LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN JUNI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 8 Juli 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Perempuan dan Anak
3. Para Kasi
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pengeluaran pembantu
6. Pejabat Verifikasi/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Notulis

Pelaksana Sub Bag Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 48,22 %

b.Keuangan = 9.825.772.740 (47,69%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Administrasi Umum							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	480.000			0		
1	Belanja Penggandaan	480.000	30	0	0	(30)	Menyesuaikan kebutuhan, dikarenakan belum ada kontrak/SPK Pengadaan, sehingga belanja penggandaan tsb tidak dapat terserap.
	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.710.000			3.400.000		
1	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.710.000	32,80	25,87	3.400.000	(6,93)	Menyesuaikan kebutuhan, kondisi pandemi ini menuntut penyelenggaraan rapat-rapat secara virtual, sehingga realisasi tidak

							dapat memenuhi target.
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.500.000			2.120.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000	36,12	27,72	2.120.000	(8,40)	Meningkatnya kasus Covid19 sehingga dikeluarkannya SE Gub tentang pembatasan PPKM maka Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tidak diperbolehkan sehingga capaiannya dibawah target yang ditentukan.
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.034.000			1.856.000		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.034.000	100	91,25	1.856.000	(8,75)	Menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	6.440.000			0		
1	Belanja Pemeliharaan Mebelair	6.440.000	50	0	0	(50)	Mengoptimalkan aset yang tersedia, dan mengurangi kontak dengan pihak luar untuk pencegahan penularan covid 19
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	76.800.000			37.800.000		
1	Jasa Tenaga Teknis	76.800.000	50	50,00	37.800.000	(0,00)	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi	34.370.000			20.960.000		

	dan Lintas Kabupaten/Kota						
1	Penguatan TPK2D Provinsi Jawa Tengah	34.370.000	61	50	20.960.000	(11)	grafik kasus covid yang semakin meningkat, harus dibatasi pesertanya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	56.110.000			47.654.000		
1	Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak	35.160.000	100	86,12	29.074.000	(13,88)	dikarenakan adanya pandemi Covid-19 (force majour) dan kebijakan pemerintah terkait PPKM yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan tersebut
2	Peningkatan Wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	20.950.000	100	88,68	18.580.000	(11,32)	dikarenakan adanya pandemi Covid-19 (force majour) dan kebijakan pemerintah terkait PPKM yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan tersebut
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50.000.000			31.400.000		
1	Bimtek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak	50.000.000	62,80	62,80	31.400.000	(0,00)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							

	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	45.262.000			1.000.000		
1	Penyusunan GDPK	45.262.000	3,60	3,53	1.000.000	(0,07)	Dinas Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Akademisi sebagai tenaga ahli dalam menyusun GDPK (USM), pada saat ini tenaga ahli tsb terdampak Covid19 sehingga belum bisa menyusun GDPK tsb.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	35.744.000			2.967.000		
1	Orientasi Kader Kelompok BKB Di Kampung KB	35.744.000	100	11,97	2.967.000	(88,03)	Pelaksanaan Workshop Advokasi Pendidikan Kependudukan direncanakan dilaksanakan di Kab. Grobogan, pada saat bln lalu Kab. Grobogan termasuk zona merah dalam kasus penyebaran Covid19, sehingga pelaksanaannya ditunda s.d kab Grobogan siap dalam pelaksanaannya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan	1.481.379.000			663.924.000		

	Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal						
1	Pelayanan KB MKJP	1.481.379.000	41,94	26,13	663.924.000	(15,81)	Kegiatan di lapangan kurang maksimal karena kondisi pandemi, banyak daerah yang tidak ada pelayanan KB karena masuk ke dalam daerah zona merah dan terjadi penyesuaian besarnya uang harian KIE bagi kader
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	46.291.000			32.185.000		
1	Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja	46.291.000	100	96,38	32.185.000	(3,62)	Pelaksanaan kegiatan ini terkena dampak refocusing sehingga anggaran yang tersisa yaitu Uang Harian, akan dilakukan perubahan pada saat perubahan APBD.

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	14	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan Juni terdapat 16 kegiatan yang berdeviasi antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya dan Belanja Penggandaan dikarenakan menunggu e katalog/ aplikasi blangkon yang menyediakan Belanja Modal alat kantor lainnya tayang (publish).
2. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Makanan dan Minuman Tamu dikarenakan Menyesuaikan kebutuhan, kondisi pandemi ini menuntut penyelenggaraan rapat-rapat secara virtual, sehingga realisasi tidak dapat memenuhi target.
3. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dikarenakan Meningkatnya kasus Covid19 sehingga dikeluarkannya SE Gub tentang pembatasan PPKM maka Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tidak diperbolehkan sehingga capaiannya dibawah target yang ditentukan.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja ATK dikarenakan menyesuaikan kebutuhan.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Pakan Ikan dikarenakan Menyesuaikan kebutuhan, dikarenakan ikan arwana (dalam aquarium) mati, maka pagu anggaran sisa akan diajukan pada perubahan APBD.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Belanja Pemeliharaan Mebelair dikarenakan Mengoptimalkan aset yang tersedia, dan mengurangi kontak dengan pihak luar untuk pencegahan penularan covid 19.
7. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Peningkatan Wawasan Terkait PUG dikarenakan grafik kasus covid yang terus meningkat, serta penghentian sementara kegiatan dengan dasar SE Gub.

8. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelatihan PPEP dikarenakan Grafik kasus covid yang semakin naik, akhirnya kegiatan yang melibatkan massa diminimalisir, termasuk hasil rapat Pimwan yang memutuskan kegiatan yang melibatkan anggota dewan ditiadakan sementara. Ditambah kebijakan SE Gub.
9. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Kegiatan Rapat Pengawasan Penanganan Kasus PPT Provinsi Jawa Tengah dikarenakan terkena dampak refocusing sehingga ditiadakan, namun masih ada pagu anggaran sisa yang akan dirubah pada perubahan APBD sedangkan Kegiatan Rapat Pengawasan direncanakan pada Bulan Juni, namun dikarenakan kasus Covid19 semakin meningkat, sehingga dikeluarkannya SE Gubernur tentang PPKM maka Rapat tersebut ditunda sampai dengan kondusi kondusif.
10. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Penguatan TPK2D Provinsi Jawa Tengah dan Layanan PUSPAGA dikarenakan peningkatan grafik covid yang tinggi, serta keluarnya SE Gubernur menghentikan sementara semua kegiatan yang melibatkan masyarakat.
11. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Verifikasi KLA Tingkat Provinsi Jawa Tengah dikarenakan pandemi covid 19 sehingga pertemuan dilakukan melalui online dan Provinsi belum dilibatkan dalam proses verifikasi KLA.
12. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Advokasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Peningkatan Wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dikarenakan adanya pandemi Covid-19 (force majour) dan kebijakan pemerintah terkait PPKM yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan tersebut.
13. Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Penyusunan GDPK dikarenakan Dinas Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Akademisi sebagai tenaga ahli dalam menyusun GDPK (USM), pada saat ini tenaga ahli tsb terdampak Covid19 sehingga belum bisa menyusun GDPK tsb.
14. Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja ada 2 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Orientasi Kader Kelompok BKB Di Kampung KB dan Belanja Jasa Tenaga Teknis dikarenakan Pelaksanaan Workshop Advokasi Pendidikan Kependudukan direncanakan dilaksanakan di Kab. Grobogan, pada saat bln lalu Kab. Grobogan termasuk zona merah dalam kasus penyebaran Covid19, sehingga pelaksanaannya ditunda s.d kab Grobogan siap dalam pelaksanaannya dan Rekrutmen tenaga teknis tidak dilaksanakan, pagu anggaran akan di rasionalisasi pada saat perubahan APBD.
15. Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelayanan KB MKJP dikarenakan Kegiatan di lapangan kurang maksimal karena kondisi pandemi, banyak daerah yang tidak ada pelayanan KB karena masuk ke dalam daerah zona merah dan terjadi penyesuaian besarnya uang harian KIE bagi kader.
16. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja dikarenakan Pelaksanaan kegiatan ini terkena dampak refocusing sehingga anggaran yang tersisa yaitu Uang Harian, akan dilakukan perubahan pada saat perubahan APBD.

Upaya

Upaya mengatasi permasalahan 16 kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu pada bulan Juli diupayakan untuk pelaksanaan 16 kegiatan tersebut, namun untuk 4 SSK antara lain Belanja Jasa Tenaga Teknis, Belanja Pakan Ikan, Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja kegiatan menunggu perubahan APBD.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan Juli sebagai berikut:

Sekretariat

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.
4. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaPenguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Provinsi.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Pemanduan dan Sinkronasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kualitas PendudukPembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja.
2. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi.

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing bidang agar mematuhi pelaksanaan kegiatan sesuai awal perencanaan yang ada di E-RKO, sehingga dapat meminimalisir terjadinya deviasi, namun apabila terjadi deviasi agar dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Masing-masing Bidang agar lebih tertib dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juni 2021, untuk menjadikan periksa.

Semarang, kamis 8 Juli 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM
NIP. 196811241993102001